

PERGESERAN PERILAKU POLITIK ELIT DALAM PROSES DAN PASCA PEMILUKADA KOTA TASIKMALAYA 2012

Subhan Agung

Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya 46115
subhanagung@unsil.ac.id

Abstrak

Fenomena terjadinya pergeseran perilaku politik dalam proses dan pasca kontestasi elektoral selalu menarik untuk dikaji secara ilmiah. Faktor apa yang menyebabkan, kepentingan yang saling berbenturan sangat pekat mewarnai dan paling menarik untuk diketahui dengan pasti dan jelas. Hal itulah yang mengilhami penelitian pergeseran perilaku politik dalam proses dan Pasca Pemilukada. Jika proses Pemilukada lebih cenderung merekam dinamika kontestasi tersebut, maka pasca pemilukada lebih cenderung melihat bagaimana kekuatan politik mengalami dinamisasi sesuai dengan kepentingan elit-elit tersebut.

Kata Kunci : Pergeseran Politik, Perilaku memilih, Elit

Abstract

The phenomenon of a shift in the political behavior of the process and post-electoral contestation is always interesting to study scientifically. What caused, conflicting interests highly concentrated coloring and most interesting to know with certainty and clear. That's what inspired the study of political behavior in the process of shifting and Post-Election. If the Election process is more likely to record the dynamics of contestation, the post-election more likely to see how the dynamics of political power suffered in accordance with the interests of the elites.

Keywords: *Shifting Politics, Voter Behavior, elite*

Tulisan ini akan mengkaji pergeseran perilaku politik elit lokal Tasikmalaya pasca pelaksanaan Pemilukada Kota Tasikmalaya Bulan Juli 2012 yang telah lalu. Fokus penelitian ini adalah *concern* terhadap perilaku elit-elit politik yang diindikasikan mengalami pergeseran antara sebelum dan setelah perhelatan Pemilukada Tasikmalaya 2012 silam. Pergeseran dalam kajian ini dipahami sebagai kecenderungan adanya perubahan dari kondisi semula. Dalam konteks penelitian ini pergeseran digunakan untuk memahami adanya kecenderungan perubahan sikap dan perilaku politik dari pra Pemilukada dan pasca Pemilukada.

Kajian ini diilhami dari penelitian sebelumnya¹, di mana sebelum Pemilukada kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya secara simplikatif dapat dipetakan pada dua kekuatan utama dan satu kekuatan *gurem*, yakni : *pertama*, kekuatan Koalisi Masyarakat Madani (KMM) yang dikomandoi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan “jagonya” Budi Budiman-Dede Sudrajat. *Kedua*, Koalisi Peduli Umat yang dikomandoi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan “jagonya”

¹ Edi Kusmayadi, dkk, 2012, *Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012*, FISIPOL Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. hlm. 52

Syarief-Bagja. *Ketiga*, kekuatan pendukung dari perseorangan dengan “jagonya” Mung Martasasmita-Taufik Faturrohman.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk sampai pada terakumulasinya ketiga kekuatan tersebut, prosesnya melalui jalan yang cukup panjang dengan dinamika tarik-ulur yang memperlihatkan “hitung-hitungan” kekuatan dan *bargaining-position* antar kekuatan termasuk partai penguasa dan partai *gurem*². Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya proses pergeseran perilaku politik elit selalu fluktuatif dan berubah-ubah tergantung beberapa hal seperti melihat sisi keuntungan bagi partai dan kelompoknya, potensi kemenangan, kemampuan dan kekuatan partai, popularitas calon dan lainnya. Bahkan jika diperhatikan lebih seksama pada saat-saat mendekati Pemilukada --yang kebetulan tidak terekam dalam penelitian sebelumnya, karena penelitian di atas hanya sampai Bulan Februari 2012—terlihat adanya bongkar pasang dukungan yang menyebabkan beberapa partai beralih dukungan.

Dari penjelasan dan konteks di atas penelitian ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya tentang dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya. Ada satu fenomena menarik yang dapat disaksikan oleh kita, dimana pasca terpilihnya Budiman Budiman dan berjayanya PPP dan kawan-kawan, konstelasi mengalami perubahan beberapa elit yang dahulunya menjadi rival dan partai pendukung Syarief sudah mulai melirik-lirik untuk mendekati

partai penguasa dan pasangan yang menang. Menarik karena harusnya mereka menjadi oposisi yang di parlemen daerah nantinya akan selalu mengkritisi bahkan “menjegal” kebijakan. Namun dengan mulai banyaknya elit-elit yang merapat ke partai penguasa dan wali kota dan wakil wali kota perimbangan kekuatan jelas menjadi statis dan tidak akan ada kelompok yang menekan atau mengingatkan pemerintahan nantinya.

Untuk melihat lebih detail bagaimana proses dan penyebab perubahan sikap dan perilaku politik elit lokal di Tasikmalaya dari pra dan pasca Pemilukada Kota Tasikmalaya maka diperlukan kajian yang lebih komprehensif. Dalam konteks itulah penelitian ini kami anggap menemukan signifikansinya. Oleh karena itulah kajian ini akan mencoba mendalami pergeseran perilaku politik elit politik pasca Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis pergeseran sikap dan perilaku politik elit pasca Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012.

Memahami Pergeseran Perilaku Politik

Fenomena otonomi daerah di masa Reformasi ini telah memunculkan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah muncul di masa Orba, semisal munculnya beratus-ratus daerah otonom baru, konflik elite lokal, munculnya raja-raja daerah, merebaknya korupsi, kewenangan dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri sampai Pemilukada langsung. Khusus yang disebut terakhir sangat menarik untuk dikaji karena kita dapat belajar banyak dari fenomena penyelenggaraan Pemilukada langsung ini.

² *Ibid*, hlm. 32-35

Salah satu diantaranya adalah munculnya kekuatan politik yang bertarung baik lewat partai maupun lewat perseorangan³.

Perkembangan baru ini tidak hanya memberikan kesempatan dan semangat tokoh-tokoh politik lokal yang dijagokan oleh Parpol, namun juga memberikan kesempatan kepada calon perseorangan atau independen untuk berkompetisi menduduki kursi kepala daerah. Tentunya untuk sampai di kursi paling prestisius di pemerintahan daerah ini bukanlah pekerjaan mudah. Butuh banyak pengorbanan materil dan pikiran dari para calon dan tim kampanyenya. Variabel semisal kuatnya basis dukungan partai, tim kampanye yang solid, besaran budget, pesan sentral kampanye, metode kampanye, citra kandidat, perhatian terhadap kepentingan konstituen adalah beberapa variabel penting untuk meraih kemenangan⁴.

Dari banyak variabel di atas, satu hal yang *taken for granted* dalam Pemilukada adalah pemilih menjadi hakim bagi penentu terpilihnya seorang kandidat⁵. Tidak peduli apakah kandidat memiliki dukungan partai yang kuat atau budget tidak terbatas tetapi apabila pemilih tidak berkenan maka semua keunggulan yang dimiliki menjadi tidak berguna. Oleh karena itu pemilih sebagai penentu kemenangan perlu dipahami dan menjadi prioritas utama dalam strategi kampanye calon. Jadi hanya calon yang

lebih banyak mencukupi hal-hal di ataslah yang dapat dipastikan mampu memenangi persaingan tersebut.

Setiap tim sukses pasti mempertahankan hatinya untuk mendukung sekuat tenaga calon yang diusungnya lewat partai politik atau gabungan partai politik, atau juga kelompok masyarakat tertentu yang mendukung calon perseorangan. Perilaku politik mereka bahkan terlihat ideologis dalam mengusung calon tersebut, seolah-olah “hidup mati” untuk pasangan calon yang didukungnya. Namun, sikap dan perilaku politik para elit yang mendukung dan tidak mendukung dapat saja mengalami perubahan setelah perhelatan Pemilukada selesai dan terpilih kepala daerah baru. Banyak elit politik yang sebelumnya kontra dengan pemenang, perlahan namun pasti mulai mendekati centrum kekuasaan. Hal ini disebabkan banyak hal semisal kepentingan kemudahan akses dilibatkan dalam proyek-proyek, bagi-bagi kekuasaan misalnya dan lain sebagainya.

Penelitian ini menempatkan perilaku politik sebagai fokus utamanya. Kajian perilaku politik sebenarnya berbeda dengan perilaku pemilih, perilaku politik skupnya lebih umum, semisal dukungan, keberpihakan, aktivitas-aktivitas yang menunjukkan dukungan ataupun tidak mendukung dan sebagainya. Perilaku politik biasanya merupakan kelanjutan dari sikap politik seseorang. Dieter Roth⁶ mengungkapkan model-model penjelasan teoretis mengenai

³ Kusmayadi, Agung dan Putra, 2012, hal. 52

⁴ Agung, 2011, *Studi Pergeseran Perilaku Pemilih Golkar pada Pemilu 2004*, Makalah Pascasarjana Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

⁵ Sabik, dkk, 2008, *Survei Pilgub di Barlingmas-cakeb*, Unsoed, Purwokerto.

⁶ Dalam Roth Dieter, *Studi Pemilu Empiris : Sumber, Teori-teori, dan Metode*, (terj.), Friedrich Naumann-Stiftung-Fur die Friiheit, Jakarta. hlm.23-53.

perilaku politik. Menurutnya terdapat tiga macam pendekatan yang dapat menerangkan pergeseran perilaku politik seseorang. Ketiganya tidak sepenuhnya berbeda, bahkan dalam banyak hal memiliki kesamaan dalam hal kronologis dasar pemikirannya. Intisari dari ketiga pendekatan tersebut kami resume sebagai berikut:

Pertama, Pendekatan sosiologis, terbagi atas model penjelasan mikrososiologis yang diilhami dari sosiolog Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson dan Hazel Gaudet. Sedangkan Makrososiologis dari Seymour Martin Lipset dan Rokkan. Menurut Mikrososiologis, setiap manusia terikat alam lingkaran sosialnya yang lebih dominan kekuatan atau pengaruhnya, semisal keluarga, rekan-rekan, tempat kerja dan lain sebagainya. Model ini kemudian diterapkan dalam memahami perilaku memilih. Makrososiologis mengacu pada konflik-konflik mendasar yang biasa muncul di masyarakat yang kesetimbangannya perlu dipertahankan dalam sebuah demokrasi. Kajian ini mereka lihat dari studi empiris di Jerman

Kedua, Pendekatan sosial-psikologis, menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan berperilaku atau tidak berperilaku seseorang, keputusan yang diambil dalam waktu singkat, yang dijelaskan lewat *trias determinan*, yakni kekuatan partai, orientasi ketokohan dan orientasi isu politik.

Ketiga, Pendekatan *rational-choice*, menurut model ini yang menentukan dalam sebuah perilaku politik bukanlah adanya ketergantungan dalam ikatan sosial tertentu, melainkan hasil penilaian dari aktor politik

murni atas kecakapannya dalam memilih dan memilah. Pusat perhatiannya terletak pada perhitungan biaya yang minimal dan manfaat yang besar bagi dirinya (*cost and benefit*). Penganjur model ini salah satunya adalah VO. Key yang melakukan penelitian di tahun 60-an dan menghasilkan karya *The Responsible Electorate*.

Melihat dari perkembangan di lapangan bahwa diindikasikan telah terjadi pergeseran perilaku politik yang sebelumnya menjadi rival dari pemenang Pemilu lewat gabungan mesin parpolnya, sudah mulai terlihat melakukan “pendekatan-pendekatan” lewat dukungan-dukungan untuk memperkuat posisi-posisi dalam perpolitikan lokal dan akses-akses politik yang banyak dikuasai oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih serta kekuatan partai dominan sebagai pendukung penguasa. Betulkah sebenarnya telah terjadi pergeseran yang signifikan dan mengapa terjadi?. Hal itulah yang harus dibuktikan secara kualitatif dalam penelitian ini.

Prosedur Kajian

Adapun yang menjadi sasaran informasi dalam kajian ini adalah elit yang sebelumnya masuk koalisi partai politik dan non koalisi serta elit yang mengusung calon perseorangan. Di antara elit-elit tersebut adalah perwakilan elit dari Koalisi Masyarakat Madani (KMM) yang dahulu mengusung H. Budi Budiman dan Dede Sudrajat. Perwakilan dari Gabungan Koalisi Peduli Umat yang dahulu mengusung H. Syarif. Selain itu juga bekas calon dari independen dan para pendukungnya. Sedangkan untuk

pembandingan adalah akademisi yang dianggap memahami fokus penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Secara teknis metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian. Pendekatan ini langsung menunjuk *setting* dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan, subyek penelitian baik berupa kelompok, organisasi ataupun individu itu sendiri. Ini tidak akan dipersempit menjadi variabel terpisah atau hipotesis, melainkan dipandang secara keseluruhan.

Dalam model penelitian ini, peneliti mencoba menggali fakta di lapangan dari fenomena yang diteliti, yang kemudian dianalisis dengan analisa deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan uji terhadap hipotesis seperti lazimnya yang dilakukan pada penelitian kuantitatif, tetapi memberikan gambaran secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan yang muncul di lapangan dengan didukung oleh data yang diperoleh.

Perilaku Pemilih dalam *Setting* Pemilukada Tasikmalaya

Ada beberapa yang bisa dijelaskan dari fenomena beralihnya dukungan, baik personal maupun kelompok terhadap satu kekuatan politik tertentu. Walaupun peneliti mengakui kajian dalam penelitian ini tidak menjawab secara empiris karena membutuhkan data survey yang rigid. Ka-

jian ini hanya melihat secara umum dan mengidentifikasi pendekatan yang biasa digunakan dalam perilaku dan sikap politik seseorang atau kelompok tertentu, khususnya dalam kajian ini adalah saat proses Pemilukada Kota Tasikmalaya.

Fenomena proses Pemilukada di Kota Tasikmalaya pada waktu lalu, perlu menjadi cermin dalam proses manajemen otonomi daerah, oleh karena proses demokratisasi dalam pemilukada menjadi metamorfosa demokrasi transaksional, demokrasi substansial hanya menjadi retorika politik dan manajemen Pemilukada oleh kandidat, tim sukses, lembaga/institusi penyelenggara pemilukada. Publik Kota Tasikmalaya sangat berharap hasil Pemilukada 2012 dapat meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Pada proses menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya, terjadi manuver politik yang dilakukan oleh elit politik dan Partai Politik. Manuver politik yang dilakukannya terkait dengan komitmen untuk melakukan *bargaining position* elit politik, baik yang terkait dengan posisi di Partai Politik maupun di luar partai politik.

Demikian pula yang terjadi dengan pembuatan rancangan *bargaining politik* lainnya, misalnya tentang kontribusi bakal calon wakil walikota dari partai yang akan berkoalisi, atau berapa nilai yang didapat dari partai politik yang mengusung kandidat walikota dari partai yang akan ikut koalisi dijadikan konsideran dalam memilih partai koalisi.

Fenomena sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan adanya demokrasi transaksional dalam proses politik pemilukada di Kota Tasikmalaya, transaksi politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Tasikmalaya tidak hanya diwarnai taburan janji, limpahan bantuan, tetapi juga tebaran ayat-ayat tentang kekuasaan. Ayat-ayat kekuasaan terselip di antara dalil-dalil kemenangan kandidat. Tidak dijelaskan ayat itu bersumber dari mana, sebab tujuan sebenarnya bukan mendakwahi pengikutnya agar menjadikan agama sebagai rujukan dalam memilih pemimpin.

Contoh tersebut dilakukan ketika calon Budi Budiman belum mendapatkan pasangan, dan kita ketahui bersama, bahwa pendamping Budi Budiman adalah Dede Sudrajat (*Incumbent* Wakil Walikota) yang berasal dari Partai yang sama dengan Budi Budiman. Keharusan itu diakomodir oleh elit Partai yang mengusungnya, dengan dalih akan lebih baik dari sebelumnya. Tujuan sebenarnya adalah meraih hasil yang menguntungkan bagi kandidat yang diusung. Keharusan menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin adalah dalil yang sering dikutip kekuatan yang menantang incumbent lain (dalam hal ini Syarif Hidayat/Walikota).

Perubahan menjadi dalil suci dalam usaha mengganti pemimpin dengan kualitas yang biasa-biasa saja adalah amalan yang dianjurkan. Meski figur baru yang diusung belum sepenuhnya teruji, nilai kebaikan dilekatkan pada keharusan melakukan ikhtiar. Sebaliknya, kekuatan pengusung *incumbent* kerap menebar pesan tentang

kehati-hatian dalam melakukan perubahan. Bahwa mencegah kerugian harus lebih diutamakan *ketimbang* mengejar keuntungan.

Maksudnya jelas, dari pada memilih pemimpin yang belum pasti kapasitasnya, mempertahankan pemimpin yang sudah jelas rekam jejak pengalamannya harus lebih diutamakan, meski prestasinya terbilang biasa-biasa saja, hal ini jelas tertulis pada berbagai spanduk/baligo dan bentuk lain yang tersebar di seluruh pelosok Kota Tasikmalaya.

Meski perang ayat telah berkurang derajatnya, perang dalil tentang kekuasaan masih kerap terjadi dalam proses komunikasi politik pemilukada Kota Tasikmalaya. Pilihan “ayat kekuasaan” sebagai bahasa politik, bukan lagi hak eksklusif bagi para kyai dan santri.

Kemunculan dalil-dalil yang disandarkan pada agama atau tokoh agama, menarik untuk dikaji oleh berbagai pihak baik memiliki kepentingan politik maupun yang tidak. Kemunculannya mengesankan transaksi politik pemilukada masih berada dalam wilayah emosional, belum bergeser ke arah rasional. Itulah sebabnya, kandidat pun kerap dituntut tidak berbicara melalui logika semata, tapi yang di pertanyakan justru logistiknya.

Uniknya, tuntutan tadi bukan semata muncul dari calon pemilih, tetapi juga dari kalangan dalam yakni tim sukses dan sebagian aktivis partai pengusung. Meski berbeda bentuk, pilihan menggunakan ayat atau menabur logistik sebenarnya memiliki makna serupa. Dua tindakan ini dilandasi

pemahaman tentang sosiologi pemilih yang dipercaya masih emosional dan reaktif. Agama dan politik memiliki relasi yang tidak sederhana.

Menarik persoalan politik yang sejatinya rasional (bisa diperhitungkan secara akal) ke wilayah agama yang transendental, masih kerap dilakukan oleh elit politik yang berlatar belakang kiai atau kiai yang memiliki interes politik. Tidak heran bila kosa kata silaturahmi lebih sering digunakan ketimbang pertemuan politik. Sorban pun menjadi properti wajib bagi tokoh yang akan nongkrong di baliho, meski profesi sesungguhnya jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Membebaskan panggung politik dari anasir-anasir agama tidak semudah yang dibayangkan kelompok yang menganut paham pemisahan agama dan politik.

Bahkan, bagi sebagian kalangan memisahkan agama dan wilayah politik bukan saja sulit, tapi dipandang tidak perlu. Tak pelak lagi, kemiskinan, pengangguran, melambungnya harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional di Kota Tasikmalaya menjadi ayat penting bagi sebagian tim sukses. Seakan keputusan untuk memilih kandidat yang diusungnya menjadi obat mujarab bagi semua persoalan yang melilit masyarakat kota Tasikmalaya, termasuk persoalan social ekonomi lainnya, misalnya jumlah pengangguran, kemiskinan, penataan kota, penyelesaian asset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pendekatan-pendekatan perilaku politik seperti yang diuraikan dalam tinjauan pustaka di atas, memang merupakan hasil kajian dan konklusi di beberapa negara

Eropa dan Amerika Serikat. Jadi yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi kasus ini dalam salah satu sudut pandang yang paling mendekati dalam mengkaji fenomena di atas.

Dari tiga pendekatan di atas, pendekatan sosial psikologis lebih mendekati dalam menganalisis kasus di atas. Analisis akan dibagi dalam tiga hal, yakni :

Identifikasi Partai dan Organisasi Primordial

Konsep identifikasi partai dalam pendekatan ini adalah bagaimana preferensi yang berasal dari predisposisi pribadi seseorang, semisal pengalaman pribadi atau orientasi politik yang sudah lama menjadi keyakinan ideologis, yang kemudian mencari corong organisasi kepartaian, Ormas atau organisasi lainnya yang cocok dengan preferensi tersebut. Kita ibaratkan banyak diantara konstituen partai atau organisasi tertentu yang memiliki latar belakang orientasi politik, atas dasar kecocokkan dengan predisposisi seperti yang diungkap tadi.

Pemahaman ini penting untuk memahami perbedaan antara idealisme kepartaian dengan dukungan partai. Seorang konstituen dengan identifikasi partai A memilih menjadi anggota partai A dan tentu saja memilihnya dalam Pemilu atau Pemilukada dan mempercayai wakil-wakilnya di parlemen, belum tentu akan mendukung program atau kebijakan partai atau keputusan partai yang dianggapnya tidak sesuai dengan *flat form* atau keyakinan politik personalnya tadi. Hal ini tentu saja menyebabkan dengan mudahnya perubahan perilaku

memilih konstituen membelot 180 derajat dari pilihan partainya. Sehingga sangat dimungkinkan konstituen partai A belum tentu secara konsisten memilih kandidat dari partai A dalam setiap Pemilu.

Partai/Organisasi identifikasi juga tidak berjalan seiring dengan keanggotaan resmi partai atau organisasi yang bersangkutan, tetapi lebih bersifat afektif, semisal warisan dari orang tua, saudara dan lain sebagainya yang terus-menerus sehingga lambat laun permanen jika konsisten perilaku memilihnya. Apapun yang terjadi biasanya orang akan tetap memilih partai tersebut, jika sudah benar-benar identifikasi kepartaiannya mengakar. Namun juga di lain pihak bisa mengalami perubahan (ketergerusan) seiring dengan gejala lainnya semisal pernikahan, krisis ekonomi, revolusi, perang dan gejala yang relative mampu merubah keyakinan dan cara pandang pemilih.

Sebagai contoh dalam fenomena proses Pemilukada Kota Tasikmalaya, terdapat personal tertentu yang memilih pasangan Budi-Dede karena pasangan tersebut merupakan representasi dari Ormas Nahdatul Ulama. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa kalangan lebih cenderung memilih Budi-Dede, karena pasangan ini merupakan representasi dari PPP dan juga Nahdatul 'Ulama. Mereka lebih memilih pasangan calon yang sebelumnya sudah dipilih oleh kakek-neneknya yang sejak dulu lebih menjadi simpatisan PPP dan basis NU.

Dari pertimbangan tersebut dapat dikategorisasikan misalnya konstituen PPP

yang memiliki identifikasi yang kuat. Ditambah lagi ikatan primordial di mana orang tuanya adalah mengidentifikasi diri sebagai anggota dari Ormas Nahdatul'Ulama.

Dalam kasus di atas terlihat jelas perilaku dan sikap politik seseorang yang dipengaruhi oleh sikap dan perilaku politik yang merupakan warisan nenek moyang mereka. Mereka terinternalisasi dalam jangka waktu yang sangat lama untuk memilih calon tertentu berdasarkan pertimbangan pilihan leluhurnya. Lambat laun pilihan tersebut mengideologi, bagaikan satu kekuatan, bahwa hal yang sudah lama berjalan dalam lingkungan keluarga mereka sebagai suatu kebenaran. Kekuatan tersebut dapat bersumber dari anggapan perbuatan tunduk atau mengikuti orang tua mereka. Sehingga jika tidak memilih seperti yang orang tua mereka lakukan dapat menyebabkan hal yang berbahaya.

Hal tersebut dikondisikan dalam jenjang waktu yang sangat lama dan secara sadar dianggap sebagai kebenaran. Dalam konteks inilah sering disebut keluarga ideologis (preperensi pemilih yang terinternalisasi). Dalam model yang seperti ini biasanya pemilih cenderung statis dan sulit berpindah "ke lain hati", kecuali terjadi gejala atau fenomena tertentu yang dapat secara radikal merubah sikap dan perilaku politiknya selama ini.

Berbicara isu primordialisme organisasi keagamaan di Kota Tasikmalaya, pengaruh beberapa Organisasi Kemasyarakatan memiliki sejarah dominasi yang sangat kuat. Organisasi-organisasi tersebut

adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Dari ketiga organisasi tersebut yang memiliki pengaruh paling kuat adalah Nahdatul Ulama. Tercatat beberapa pesantren besar di Tasikmalaya, menjadi “sarang” dari organisasi ini. Misalnya Cipasung, Miftahul Huda, Suryalaya. Ketiga pesantren besar tersebut mengembangkan cirri khas masing-masing. Misalnya Cipasung dengan gaya tradisionalisme Islamnya, Manonjaya dengan gaya Salafiyah dan Suryalaya dengan *Thorikoh*-nya.

Pendukung tokoh pesantren-pesantren tersebut sangat terinternalisasi dalam banyak pemahaman keluarga-keluarga lainnya yang menjadi anggota Ormas NU. Biasanya jarang ada perubahan yang signifikan pada mereka. Kelompok Ormas NU di Tasikmalaya cukup plural dalam memilih partai politik. Mereka ada yang menjadi konstituen PPP, PKB, Golkar, PBB, bahkan PKS. Kemenangan Budi-Dede salah satunya karena tokoh ini merupakan tokoh muda yang didukung kuat oleh NU dalam berbagai versi yang telah disampaikan di atas. Dede Sudrajat merupakan calon wakil Budi yang “digadang-gadang” oleh KH. Asep Maoshul, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya.

Orientasi Kandidat dan Isu

Dalam memilih para konstituen juga akan sangat memperhatikan kandidat yang diajukan dalam Pemilu. Kandidat yang sempurna dalam pandangan setiap konstituen akan sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Pilihan yang berorientasi

kandidat sangatlah wajar dan justru dalam konteks Indonesia sangat *ngetrend*. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan sekali figur pemimpin, latar belakang, kualifikasi individualnya termasuk di dalamnya tingkat kematangan atau pengalaman dan lainnya. Kita diingatkan akan persoalan ini dengan konsep presiden seumur hidup di masa Soekarno, lamanya pemerintahan Orba, dan terpilihnya SBY yang dianggap memiliki pembawaan lahiriyah yang menjanjikan.

Kekalahan Syarif-Bagja dalam Pemilu Tasikmalaya tahun 2012, boleh jadi disebabkan oleh banyaknya konstituen PAN dan simpatisan pribadinya yang pindah ke “lain hati”. Hal ini disebabkan fenomena dan kondisi terkini yang dilihat oleh konstituen dan simpatisan sebagai kecacatan calon. Dukungan selama ini dilakukan karena kecacatan tersebut tidak terdeteksi. Namun, pada akhirnya mereka mampu mendeteksi hal tersebut, sehingga menyebabkan “sakit hati”.

Banyak kalangan yang merasa sakit hati oleh Syarif Hidayat, sekaligus juga beranggapan jika mendukung Pak Budi-Dede usahanya akan “ketularan maju”. Beberapa informan mengakui bahwa perubahan sikap dan pilihannya dari Syarif ke Budi disebabkan “sakit hati”. Disamping itu, beberapa orang mengaku mengagumi rival Syarif tersebut, dikarenakan keduanya sebagai pengusaha yang sukses di Tasikmalaya.

Persoalan “sakit hati” oleh salah satu kandidat memang lebih banyak terjadi dikarenakan tidak tercapainya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu ketika

calon tersebut pertama kali diusung atau didukung. Selain itu juga dapat pula karena selama ia memimpin tidak sesuai dengan janji-janjinya selama ini. Salah satu contoh kekesalan konstituen terhadap tokoh yang selama ini diusung.

Sebagai contoh perubahan perilaku politik seorang pengusaha sukses di Tasikmalaya, yang kebetulan tetangga salah satu informan, sejak awal beliau adalah pendukung kuat tokoh Syarief, khususnya dalam Pemilu Kota Tasikmalaya sebelumnya (5 tahun ke belakang). Beliau bahkan termasuk pihak yang banyak mengeluarkan dukungan materil terhadap Syarief. Namun diperjalanan kepemimpinan Syarief, tokoh ini merasa kecewa, karena dianggapnya selama ini Syarief tidak respek sama sekali terhadap kepentingannya. Sehingga di Pemilu Kota Tasikmalaya tahun 2012, beliau mendukung Budi-Dede. Hal ini dilakukan karena *saking* bencinya terhadap Syarief.

Dari informasi di atas, dapat dibuat pernyataan sementara bahwa salah satu hal penting dalam merubah perilaku memilih seseorang adalah figure calon yang bersangkutan. Kualitas figur yang bersangkutan dapat dilihat dari seberapa kuat integritas pribadinya dalam kehidupan. Memiliki pendirian yang benar-benar dapat dipercaya oleh konstituen dalam memperjuangkan kepentingannya, keberpihakannya terhadap konstituen tersebut, *power* yang dapat diandalkan dalam memimpin pemerintahan ke depannya dan sebagainya.

Dalam kasus Pemilu Kota Tasikmalaya 2012 kemarin, pasangan Budi-Dede mampu mencitrakan sebagai pasangan

muda, bersih. Slogannya yang sangat terkenal : “yang muda, yang memimpin” mampu menyedot perhatian masyarakat Tasikmalaya. Slogan ini juga secara tidak langsung memberikan pemahaman baru kepada masyarakat, bahwa lebih baik memilih pemimpin muda, sukses dan bersih dari pada rezim sebelumnya yang terbukti berjalan “biasa-biasa saja”.

Pemberitaan media local seperti Radar Tasikmalaya (Periode Januari 2013-Maret 2013) lebih cenderung memberitakan pasangan Budi-Dede melakukan kampanye *blusukan* ke kelurahan-kelurahan di Kota Tasikmalaya, tanpa di *dekeng* oleh para ajudannya. Hal ini berbeda dengan kesan Syarief yang cenderung elitis, selalu di kawal lengkap oleh para ajudan ketika melakukan kunjungan, baik formal maupun informal ke kelurahan-kelurahan, atau kecamatan.

Kesan di atas tertanam kuat di beberapa lapisan masyarakat Kota Tasikmalaya. Bahkan tanpa sengaja ketika satu hari sebelum pencoblosan peneliti mendapat informasi dari beberapa orang yang sedang berbincang mengenai kontestasi dalam Pemilu Kota Tasikmalaya 2012. Saat itu peneliti sedang menunggu pesanan Nasi Goreng (Nasgor) di Kawasan Bundaran Jati, Indihiang. Kebetulan malam itu adalah malam menyambut pencoblosan di keesokan harinya. Sekelompok orang tukang ojek, beca dan termasuk ibu penjual Nasgor berbincang. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih menyukai Budi-Budiman dan akan mencoblosnya, karena baik, dekat dengan masyarakat, berbeda dengan Syarief yang dianggap mereka pelit (*medit*) dan

sombong (*gumede*).

Dari perbincangan tanpa sengaja tersebut, terlihat kentara bahwa mereka cenderung akan memilih pasangan Budi-Dede, dikarenakan dianggap menyatu dan paham kondisi masyarakat Kota Tasikmalaya. Sedangkan Syarief dianggapnya elitis, sehingga mereka yang dulunya mendukung Syarief, justru berpindah ke Budi-Dede. Dalam kajian ilmu politik kondisi berpindahnya dukungan tersebut biasa disebut *swing voter*.

Pergeseran Sikap dan Perilaku Politik Elit Politik

Pemilukada Tasikmalaya 2012 menjadi salah satu tonggak sejarah Pemilu yang sangat dinamis dengan tarik ulur kepentingan yang sangat kuat dan kentara secara “kasat mata”. Tarik ulur kepentingan tersebut lebih memperlihatkan bahwa politik diartikan sebagai : “cara untuk mendapatkan, mengelola dan mempertahankan kekuasaan”. Lebih sederhananya lagi politik diartikan hanya sebatas kekuasaan.

Gejala bertebarannya elit politik yang “digadang-gadang” untuk menjadi wali kota atau wakil wali kota ketika proses Pemilukada masih “pagi” boleh jadi merupakan suatu kebanggaan masyarakat Tasikmalaya. Banyak elit yang tertarik untuk menduduki jabatan Z 1 tersebut. Selain itu juga dengan munculnya banyak calon, diharapkan kompetisi semakin ketat. Tentu saja harapan akhirnya adalah melahirkan pemimpin yang benar-benar hasil seleksi ketat, yang kompatibel dengan tantangan kehidupan dan masalah yang sedang diha-

dapi masyarakat Kota Tasikmalaya saat ini.

Namun apa yang terjadi, semakin dekatnya pelaksanaan Pemilukada Kota Tasikmalaya, calon-calon yang awalnya berani tampil, mulai menyusut, ada yang mundur “tidak terlihat batang hidungnya”. Ada juga yang bergabung dengan kekuatan partai lain. Diakhir-akhir pelaksanaan Pemilukada disibukkan dengan tukar-menukar kepentingan (*bargaining position*) partai dengan partai lain. Partai yang calonnya dianggap kuat (populer dan elektabel) menjadi pihak yang “percaya diri” dan menjadi *main-stream* kekuatan utama, semisal Partai Amanat Nasional dengan calon kuatnya Syarief, waktu itu. Begitu juga PPP dengan calon tunggalnya Budi Budiman. Kedua kekuatan ini “santai-santai” saja sambil menunggu partai lain bergabung. Perubahan sikap dan perilaku banyak terjadi dalam dataran partai-partai pendukung. PKS misalnya dari awal mendukung Syarief, diakhir-akhir kemudian berpindah ke kuatan Budi setelah calonnya (Heri Ahmadi) ditolak PAN dan Syarief. Tentang hal ini diakui oleh salah seorang informan fungsionaris PKS (Dede Abdul Karim). Menurutnya kekecewaan PKS terhadap Syarief karena cenderungnya *plin-plan*, selain itu juga tidak ada keuntungan bagi PKS saat itu untuk mendukung Syarief, karena tokoh yang dicalonkan dari pihak PKS ditolak Syarief. Selain itu juga hasil survei terbaru dari lembaga terkemuka, menunjukkan bahwa elektabilitas Syarief sebagai *incumbent* semakin menurun. Pemilu dalam konteks tersebut dianggap sebagai memilih yang menang.

Dari pernyataan tersebut ada beberapa hal yang menjadikan PKS sebagai lembaga politik melakukan pengalihan sikap dan dukungan politik terhadap calon lainnya. Hal ini disebabkan pertama, tidak terakomodasinya kepentingan partai yang bersangkutan dan kedua, mereka menganggap bahwa Budi-Dede lebih *electable*.

Pergeseran sikap dan perilaku politik juga dilakukan oleh wakil incumbent (Dede Sudrajat) yang sebelumnya didukung kuat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dukungan PDI-P disebabkan pertimbangan bagi-bagi “kue” kekuasaan. Jika Dede Sudrajat mencalonkan Wali Kota, maka PDI-P meminta jatah wakil wali Kota. Namun sikap yang mengejutkan banyak pihak dilakukan Dede Sudrajat di akhir Februari 2013. Dede Sudrajat yang sebelumnya sudah siap dan diberikan restu oleh pengusaha kawakan, Soleh Budiman (ayandanya), secara mengejutkan, memutuskan bergabung dengan kekuatan Koalisi Masyarakat Madani (KMM) dan mendampingi H. Budi Budiman. Akrobat politik ini memberikan kekecewaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan keduanya. Ada pihak yang kecewa terhadap Budi, karena tentu saja mereka kehilangan kesempatan mendampingi Budi Budimana sebagai wakil, ada juga yang kecewa terhadap Dede Sudrajat, karena mereka kehilangan peluang menjadi wakilnya Dede.

Di saat yang sama juga, kekuatan penyeimbang Budi yaitu Syarief melakukan akrobat politik yang unik. Syarief terkesan menentukan calon wakilnya di “babak” *injury time*. Hal ini dilakukan untuk tetap

menyelamatkan koalisi yang dibangunnya (Koalisi Peduli Umat). Di awal Bulan Maret Koalisi ini berembuk untuk menentukan calon wakilnya Syarief, namun rapat *deadlock*, dengan hasil nihil. Bahkan karena hasilnya, media-media local memberitakan bahwa Koalisi Peduli Umat telah bubar. Namun tentu saja hal itu disanggah oleh pihak KPU. Pertunjukkan kemudian dilanjutkan dengan beralihnya Syarief ke calon dari Birokrat. Bagja, seorang birokrat kawakan kemudian terpilih sebagai calon wakil dari kubu Syarief. KPU pun dikabarkan pecah, dan banyak pihak yang kecewa dengan keputusan Syarief tersebut. Tercatat banyak anggota koalisi yang kemudian pindah dukungan ke Budi-Budiman saat itu.

Tentang hal ini, secara lugas ditanggapi oleh informan Ramdani Mun'im (Ketua Fraksi PPP Kota Tasikmalaya, TIM Sukses Budi-Dede). Menurutnya memang ketika Syarief memutuskan mengambil calon dari luar partai saat itu, banyak anggota koalisi yang mengalihkan dukungan ke kita (Budi-Dede). Hal tersebut dianggapnya lumrah dalam politik praktis. Jika kepentingannya tidak terakomodir, maka biasanya mencari pihak yang mampu mengakomodir kepentingannya tersebut. Kondisi tersebut saat itu dianggap menguntungkan bagi PPP.

Selain hal itu juga, kejadian yang mengejutkan adalah dicopotnya Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Otong Koswara sebagai ketua DPRD dari PPP. Hal ini disebabkan anggapan indisiplinernya tokoh ini sebagai kader PPP yang saat itu telah menyepakati Budi-Dede sebagai pasangan, dengan mengikuti *fit and propert test* calon

wakil wali kota pasangan Syarief. Tindakan ini tidak hanya Otong di copot dari Ketua DPRD (Pergantian Antar Waktu), namun juga diberhentikan sebagai kader PPP.

Tindakan Otong ini disebabkan “rayuan” kekuasaan untuk menjadi wakil wali kota. Padahal saat itu, mantan ketua PPP sebelum Budi Budiman ini sedang menduduki posisi nomor wahid di DPRD Kota Tasikmalaya.

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas, bagaimana tarik ulur kepentingan dengan tujuan kekuasaan sangat kentara. Ada yang berakhir menguntungkan, bahkan ada juga manufer yang dilakukannya berujung “bunuh diri”. Nafsu sesaat untuk menduduki kekuasaan yang dianggap lebih menjanjikan kadang kala berakhir tragis.

Pergeseran Sikap dan Perilaku Politik Golongan Kiayi

Kajian ini berusaha mengungkap adanya pergeseran sikap dan perilaku politik kiayi di Kota Tasikmalaya. Seperti yang diketahui bersama, bahwa Tasikmalaya merupakan salah satu basis santri terbesar di Indonesia. Peran kyai dalam politik dapat dikatakan cukup mendominasi dalam perpolitikan di Tasikmalaya.

Begitu kuatnya peran politik ulama dalam ranah politik di Kota Tasikmalaya disebabkan karena isu-isu populis yang paling diterima oleh sebagian besar pemilih rasional adalah isu-isu seputar religiusitas dan nilai-nilai Islam. Di samping itu, jaringan ketokohan ulama sangat kuat dan menguasai simpul-simpul massa sampai ke

pelosok-pelosok. Ulama oleh para politisi yang bertarung pada Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 yang lalu dijadikan sebuah simbol pencitraan kepada masyarakat.

Citra diri yang ingin dibentuk manakala calon tersebut menggandeng ulama adalah citra yang religius dengan komitmen mengangkat nilai-nilai religius Islam. Bahkan ada analisa yang berkembang dikalangan intelektual lokal Kota Tasikmalaya, kemenangan H. Syarif pada Pemilukada 2007 lalu adalah janjinya bersama-sama dengan ulama akan membuat Peraturan Daerah berbasis syariah. Maka pada 2009 lalu, lahirlah Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Tata Nilai. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa Peraturan Daerah tersebut hampir semuanya mengadopsi peraturan hukum di Aceh.

Pergeseran sikap dan perilaku ulama pada Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 yang lalu misalnya disampaikan oleh KH. Mufti, dia adalah Sekretaris Eksekutif Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya. Dia mengatakan bahwa setiap kontestasi politik termasuk Pemilukada, ulama akan selalu melibatkan diri dengan cara memberikan dukungan kepada salah satu calon yang akan bertarung. Dari sisi idealitas, komitmen ulama ketika melibatkan diri pada politik praktis adalah dalam rangka memperjuangkan atau mengakomodasikan nilai-nilai Islam ke dalam tataran kebijakan.

Pemetaan ulama yang disampaikan oleh KH. Mufti diantaranya : *pertama*, ulama kharismatik yang tidak memiliki jabatan struktural di partai politik atau

di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu. *Kedua*, ulama kharismatik yang memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu. *Ketiga*, ulama ditingkat akar rumput yang tidak memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu, dan yang *keempat* adalah ulama akar rumput yang memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu.

Kelompok ulama pertama merupakan kelompok ulama yang tergolong independen, tapi kemudian pada saat menjelang Pemilu akan menentukan dukungannya kepada salah satu calon yang dipicu oleh faktor kedekatan, ideologi ataupun komitmen. Dua cara keterlibatan ulama adalah didekati atau mendekati.

Kelompok ulama yang kedua merupakan kelompok ulama yang memang telah memiliki afiliasi politik tertentu, jadi modal politiknya telah dibangun berdasarkan jaringan yang telah terbentuk, entah di partai politik atau organisasi politik tertentu. Walaupun pada kenyataannya berkaca pada Pemilu 2007 berdasarkan konstelasi politik yang terus berkembang dukungan ulama kelompok ini tidak melulu berdasarkan jaringan partai politik atau organisasi politik yang sudah dibangun, tapi dukungan itu berdasarkan pendekatan ketokohan calon yang akan bertarung.

Kelompok ulama yang ketiga, sama halnya dengan kelompok ulama yang per-

tama, mereka cenderung independen, tetapi karena hirarkis jaringan ulama dari atas hingga ke akar rumput, akhirnya ulama ditingkat akar rumput ini akan melibatkan diri untuk dukung mendukung kepada salah satu calon. Tapi sebagian besar ulama akar rumput ini tidak pernah melibatkan diri secara aktif dalam mendukung salah satu calon, sifatnya hanya sekedar memfasilitasi calon dengan masyarakat ketika calon tersebut melakukan safari politik ke daerahnya, karena seperti biasanya bila salah satu calon ingin bersafari politik ke pelosok daerah, orang pertama yang dikunjungi atau diminta memfasilitasi adalah ulama.

Jenis yang selanjutnya adalah kelompok ulama keempat. Kelompok ulama ini sama halnya dengan kelompok ulama yang kedua, mereka sudah memiliki afiliasi politik tertentu sehingga akan mudah ditebak kepada siapa ulama itu memberikan dukungan. Tapi lagi-lagi karena adanya perubahan dinamika politik yang ada, ulama ditingkat akar rumput ini memberikan dukungan dengan bebas tanpa adanya keterikatan dengan partai atau organisasi politik yang mempunyai afiliasi dengan calon tertentu.

Dari pemetaan diatas, dapat dilihat bahwa bahwa dalam setiap konstelasi politik dalam tataran idealitas para ulama ingin memperjuangkan nilai-nilai religious. Pergeseran perilaku dan sikap politik dimungkinkan terjadi karena berbagai dinamika dan kepentingan-kepentingan politik tertentu, tidak ada batasan yang jelas antara perjuangan mengakomodasikan nilai-nilai religious dengan perjuangan

mendapatkan kekuasaan. Bahkan yang terjadi adalah pemanfaatan instan kekuatan ulama. Sebagai indikasinya merujuk pada Pemilu 2007, ketika H. Syarif menang seolah komunikasi antara H. Syarif sebagai Walikota dengan ulama terputus, hal ini ditandai dengan menjamurnya karaoke yang mendapat izin dari pemerintah yang menjadi kontroversi. Dalam kasus ini kita bisa melihat bagaimana terputusnya komunikasi politik dengan ulama.

Ulama-ulama yang dahulu mendukung Syarif saat ini juga justru berpindah ke lain hati. Diantara ulama-ulama tersebut ada yang karena alasan pelaksanaan Perda yang “formalitas”. Banyak kalangan ulama yang menganggap Perda Syariah (Tata Nilai) politis untuk kepentingan Syarif semata (janji kepada ulama saat itu). Namun miskin implementasi. Hal ini dianggap “jangan-jangan”, proses perumusan kebijakan tersebut tidak benar, tidak berdasar pada keinginan masyarakat secara umum.

Selain itu juga ada beberapa ulama yang berpandangan primordial, yakni karena pasangan Budi-Dede dicalonkan oleh Ormas NU, maka ulama-ulama tersebut mendukung Budi-Dede sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Simpulan

Dari pemaparan hasil penelitian dan pengembangan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, Telah terjadi pergeseran sikap dan perilaku politik selama proses dan pasca Pemilu Kota Tasikmalaya 2012. Pergeseran tersebut terjadi terhadap pasangan yang satu dan yang

lainnya. Namun sebagian besar pergeseran terjadi dari pendukung Syarif yang beralih ke pendukung Budi-Dede;

Kedua, Pergeseran tersebut disebabkan oleh faktor-faktor politis seperti orientasi isu dan kandidat yang berkembang secara langsung lewat kontak sehari-hari, maupun lewat pemberitaan media massa, internalisasi kepartaian dan Ormas. Selain itu juga pergeseran terjadi pada wilayah elit-elit politik dalam Parpol. Penyebab pergeseran tersebut lebih disebabkan oleh tidak terakomodirnya kepentingan lembaga dan pertimbangan elektabilitas calon yang diusung. Dari pemetaan tersebut, secara paktis, pergeseran sikap dan perilaku politik masyarakat dan lembaga politik terjadi karena “sakit hati”, *vested interest* terhadap salah satu pasangan, ketokohan dalam bidang usaha (kesuksesan ekonomi), internalisasi kepartaian dan organisasi agama (kemasyarakatan).

Ketiga, Pergeseran sikap dan perilaku politik merupakan sesuatu yang lumrah dalam elektoral (pemilihan). Hal ini terjadi karena terdapat eskalasi informasi yang didapat dari berbagai media. Hal tersebut dapat mempengaruhi *like and dislike* pemilih (konstituen) terhadap calon elit yang akan dipilihnya. Kampanye adalah salah satu alat yang efektif yang mampu mengubah dan mempertahankan sikap dan perilaku memilih masyarakat. Semakin hebat strategi dan solidnya tim sukses dalam melakukan kampanye yang tepat sasaran, semakin besar kemungkinan meraup suara pihak lain atau mempertahankan suara pihak tersebut.

Daftar Pustaka

- Agung, Subhan, 2011, *Studi Pergeseran Perilaku Pemilih Golkar pada Pemilu 2004*, Makalah Pascasarjana Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.
- Kusmayadi, Edi, dkk, 2012, *Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilu 2012*, FISIPOL Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.
- Dieter, 2000, *Studi Pemilu Empiris : Sumber, Teori-teori, dan Metode*, (terj.), Friedrich Naumann-Stiftung-Fur die Freiheit, Jakarta.
- Moleong, L. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sabik, Ahmad, dkk, 2008, *Survei Pilgub di Barlingmascakeb*, Unsoed, Purwokerto.